



RENCANA STRATEGIS

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2025-2026



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat-Nya maka penyusunan Rencana Strategis Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini disusun sebagai petunjuk serta pedoman dalam melakukan perencanaan tahunan pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengantujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat yang efektif dan efisien.

Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025-2026 ini merupakan kewajiban bagi perangkat daerah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk membuat perencanaan kinerja terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025–2026 ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi, namun demikian telah dilakukan upaya optimal melalui koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang berkompeten agar dapat menghasilkan sebuah renstra yang dapat memberikan gambaran secara utuh terkait arah dan kebijakan pelayanan di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas seluruh aparatur di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Harapan kami kiranya apa yang dikerjakan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Terwujudnya Kabupaten Rote Ndao Yang Bersatu dan Maju Menuju Kemandirian yang Berdaya Saing dan Bermartabat.

Baa, Januari 2024
Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra
Setda. Kabupaten Rote Ndao,

Ronald H. Taulo, S.STP
Pembina
NIP. 19851023 200312 1 002

DAFTAR ISI	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ADMINISTRASI	
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Strukur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya.....	11
2.2.1 Sumber Daya Manusia	11
2.2.2 Sarana Prasarana	12
2.3. Kinerja Pelayanan	14
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
Bagian Administrasi pemerintahan Dan Kesra	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan	
Fungsi Pelayanan	21
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program	
Rote Ndao	21
3.3 Telaahan Renstra K/L	22
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
Lingkungan Hidup Strategis	23
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	23
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	25
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Perangkat Daerah.....	25
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan	
Tujuan dan Sasaran RPJMD	23
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	26
5.1 Strategi	26
5.2 Kebijakan	26
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	27
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	29
BAB VIII PENUTUP	30

DAFTAR TABEL	HALAMAN
2.1 PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	11
2.2 PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan	11
2.3 PNS Berdasarkan Jabatan Struktural	11
2.4 Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya	12
2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14
2.6 Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	16
2.7 Analisis Strategis Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.....	19
3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	21
3.2 Faktor Penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao	22
3.3 Permasalahan Pelayanan Bagian Adm. Pemerintahan dan Kesra Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	23
3.5 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesra dan Dinamika Lingkungan Strategis	24
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	25
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	26
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bagian Tahun 2020 Bagian Pemerintahan dan Kesra	28
7.1 Indikator Kinerja Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah proses yang kontinu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah Suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses

perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka Bupati menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dan memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026.

Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Bagian Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao melakukan penyusunan dokumen Renstra PD Tahun 2025-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

Selanjutnya, RENSTRA Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan tahun 2026.

1.2. Dasar Penyusunan Renstra

Dasar penyusunan Rencana Strategis Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;
18. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda selama kurun waktu dua tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

1.3.2. Tujuan

Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu dua tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian tupoksi Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao.
- c. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Bagian Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 Latar belakang: mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD.
- 1.2 Dasar Penyusunan Renstra : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan tujuan: Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan: Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup:

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah: memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah: memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah: bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan.
- 2.5 Mitra Kerja Sama dengan Organisasi Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Permasalahan utama, permasalahan dan akar masalah).
- 3.2 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Hasil Identifikasi permasalahan digunakan sebagaia bahan kajian dalam merumuskan isu strategis perangkat daerah untuk periode Renstra Tahun 2025-2026.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

Pada bagian ini mencakup :

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.
Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.
- 4.2. Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Rote Ndao 2025-2026.

7.2. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2026
Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPD Tahun 2025-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Strukur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, maka Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu bagian yang berada di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, dan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang menduduki Jabatan Eselon III-a dan berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, maka Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki peran membantu Pemerintah Daerah dalam upaya pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain:

1. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
2. Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Penataan Daerah Otonomi Baru; dan
4. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah, maka ditetapkan tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok ***“Membuat rencana operasional di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan di Sub Bagian***

Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahaan, Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kerjasama dan Otonomi Daerah”

2. Fungsi

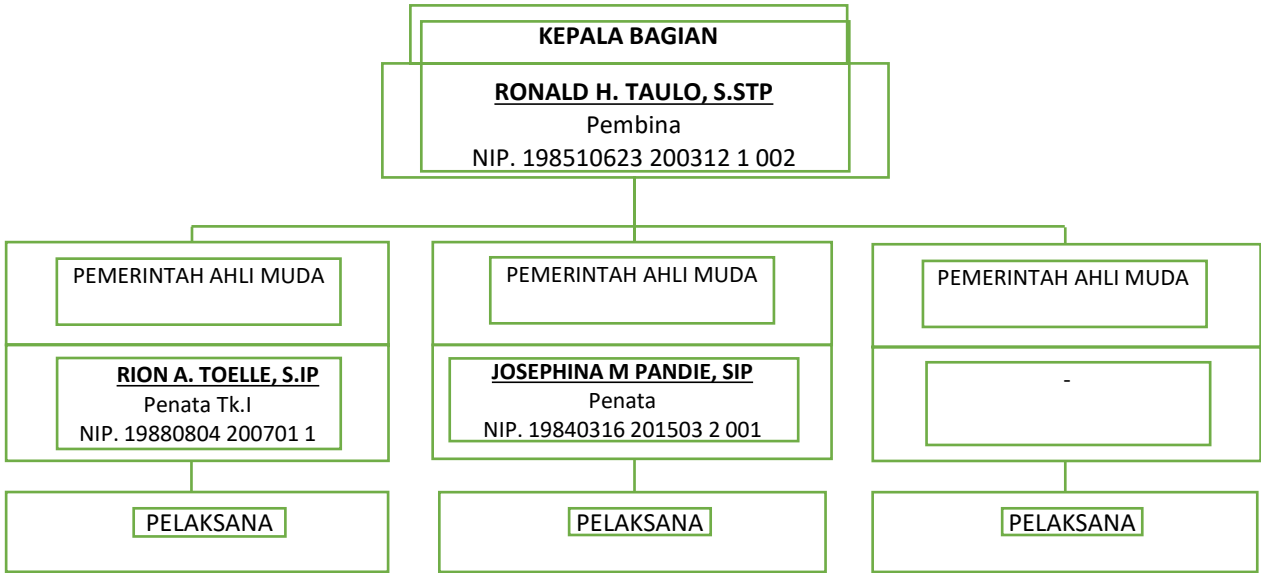
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perencanaan operasional Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Pelaksanaan kebijakan operasional di bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Pembagian tugas, memberi petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Struktur Organisasi Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bagian yang didukung oleh 3 (tiga) Pejabat Fungsional yaitu Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahaan, Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi

Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Rote Ndao



Bagan Struktur Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao seperti tergambar di atas merupakan salah satu elemen penting yang memungkinkan beroperasinya seluruh sumber daya aparatur yang ada dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Disamping tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Rote Ndao tersebut diatas, juga terdapat elemen lain yang turut mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu ketersediaan sumber daya.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Secara kualitas, sumber daya manusia aparatur yang tersedia pada Bagian Pemerintahan dan Kesra cukup memadai namun secara kuantitas belum memadai untuk melaksanakan tugas-tugas secara baik. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dengan kompleksitas permasalahan yang ditangani oleh Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam tata pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 2.1
Jumlah pegawai Pemkes Berdasarkan Pangkat, Golongan Dan Jabatan
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	Ronald H. Taulo, S.STP NIP. 19851023 200312 1 002	Pembina/ IV A	Kepala Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Rion A. Toelle, S.IP NIP. 19880804 200701 1 002	Penata Tk. I / III D	Penilai Pemerintah Ahli Muda (Sub Koor. Adm. Pemerintahan dan Kewilayahan)
3	Josephina M. Pandie, S.IP NIP. 19840316 201503 2 001	Penata/ III C	Penilai Pemerintah Ahli Muda (Sub Koor. Kesejahteraan Rakyat)
4	Hasinah Badu, S.Sos NIP. 19830520 201503 2 001	Penata Muda TK.I III/ B	Analisis Kemasyarakatan
5	Rezky K. Koamesah, S.STP NIP. 19980129 202028 1 001	Penata Muda / III A	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
6	Andry Aprinyoto M. Pellondou, S.Tr.IP NIP. 19980428 202108 1 002	Penata Muda / III A	Analisis Kerjasama Lintas Sektor
7	Andi Wahyu U. A. Diyatri Muhibuddin NIP. 19980626 202208 2 002	Penata Muda / III A	Analisis Kelembagaan
8	Anggrita Yaku D. Kamalanda NIP. 19980113 202208 2 001	Penata Muda / III A	Analisis Pemerintahan Daerah

Table 2.1 Menunjukkan Sumber daya manusia yang dimiliki Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 adalah sebanyak 8 (delapan) orang. Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, Pelaksanaan operasional Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rote Ndao di dukung tenaga kontrak daerah yang dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Tenaga Kontrak Bagian Pemerintahan dan kesra Setda
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JENIS KELAMIN		Jumlah
			L	p	
1	Hilda Aked	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1	-	1
2	Marthinus Ndun	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1	-	1
3	Ronald J.Y Haning, SH	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1		1
4	Agustina Lifu, S.Pd	Pengelola Administrasi Pemerintahan	-	1	1
5	Mikron Adu	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1	-	1
6	Ray Arjuna Haning	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1	-	1
Total			5	1	6

Dilihat dari tabel 2.2 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kontrak di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Rote Ndao berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang menduduki jabatan Pengelola Administrasi Pemerintahan sebanyak 6 (enam) orang.

Gambaran potensi sumber daya manusia aparatur Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin				
NO	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana (S2)	-	-	0
2	Sarjana	6	2	8
3	Diploma III	-	-	0
4	SLTA	-	-	0
Jumlah		6	2	8

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa jumlah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rote Ndao sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari pendidikan S1.

Tabel 2.4 PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan				
No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina (IV/a)	1	-	1
2	Penata Tingkat I (III/d)	1	-	1
3	Penata (III/c)	-	1	1
4	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	1	1
5	Penata Muda (III/a)	3	1	4
Jumlah		5	3	8

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa jumlah ASN Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rote Rote Ndao sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, golongan III sebanyak 7 (tujuh) orang.

2.2.2. Sarana Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Rote Ndao memiliki sarana dan prasaranan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya					
A. Kendaraan					
No.	Merk/Tipe	No. Polisi	Tahun Pembelian	Jumlah	Keterangan
1.	Toyota/Avanza	DH 274 VB	2019	1 unit	Baik
2.	Carry/Suzuki	DH 44 YU	2004	1 unit	Rusak Berat
3.	Carry/Suzuki	DH 48 YU	2004	1 unit	Pinjam pakai
4.	Honda/Revo Fit	DH 5647 YU	2011	1 unit	Baik
5.	Honda/Revo Fit	DH 5783 YU	2012	1 unit	Baik
6.	Honda/Revo Fit	DH 5811 YU	2012	1 unit	Baik
7.	Honda/Revo Fit	DH 5751 VB	2011	1 unit	Baik
8.	Honda/Supra Fit	DH 5788 YU	2006	1 unit	Baik
9.	Honda/Revo Fit	DH 5784 YU	2012	1 unit	Baik
.10.	Honda/Revo Fit	DH 5874 VB	2014	1 unit	Baik

11.	Honda/Revo Fit	DH 5752 YU	2014	1 unit	Baik
12.	HONDA WIN MCB 97	DH 5676 G	2002	1 unit	Rusak Berat
13.	HONDA WIN MCB	DH 5399 YU	2004	1 unit	Rusak Berat
B. Peralatan Kantor					
No	Jenis Barang>Nama Barang	Merk/Type		Jumlah	Keterangan
1.	Printer HP	DesPkjet 1010		1 unit	Baik
2.	Mesin ketik	Portable		1 unit	rusak
3.	Mesin ketik	Langewagon		1 unit	rusak
4.	Filing cabinet	Besi		5 unit	Baik
5.	Camera vidio	Canon		1 unit	Rusak
6.	Camera film	Canon		1 unit	Rusak
7.	Global Positioning System	Garmin		1 unit	Rusak
8.	Printer Canon	Pixma ip 2770		1 unit	Baik
9.	Printer canon	G.2010		1 unit	Baik
10.	Printer canon	Pixma G 1010		1 unit	Baik
11.	Printer canon	Pixma 3010		1 unit	Baik
12.	Printer	Brother		2 unit	Rusak
13.	Printer	Epson		1 unit	Rusak
14.	Wireless	Toa		1 unit	Baik
15.	Speaker	Wireles PERFECT		1 unit	Baik
16.	Camera	Canon		1 unit	Baik
17.	Infokus komplit	EPSON		1 unit	Baik
18.	Air Conditioning	LG		1 unit	Rusak
19.	Air Conditioning	POLYTRON		1 unit	Baik
20.	Laptop	Acer Virtual Souround Sound		1 unit	Baik
21.	Laptop	LENOVO Dolby		1 unit	Baik
22.	Laptop	Thoshiba Satelite C840		1 unit	Rusak
23.	Laptop	Thoshiba		1 unit	Baik
24.	Laptop	Acer Aspire E 14		1 unit	Baik
25.	Laptop	Acer Es 14		1 unit	Baik
26.	Komputer	Lenovo		1 unit	Baik
27.	Komputer	Lenovo		1 unit	Rusak
28.	Finger print	SOLUTION		1 unit	Baik
29.	Drumband	Sanex		1 paket	Rusak
30.	Meja Biro	Kayu/Besi		20 unit	Baik
31.	Lemari Arsip	Kayu		10 unit	Baik
32.	Kursi	Kayu/Besi		35 unit	Baik

Berdasarkan penjelasan pada tabel 2.5 diatas maka sarana dan prasarana Bagian Pemerintahan Dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao terdapat 3 (tiga) Aset Rusak Berat, 21 (dua puluh satu) Aset rusak, 20 (Dua Puluh) Aset baik, 1 (Satu) Aset pinjam pakai.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayan perangkat daerah, anggaran dan realisasi Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rote Ndao selama dilihat pada tabel 2.6 dan tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama PD	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	ST	Tinggi	SangatTinggi	SangatTinggi	SangatTinggi	SangatTinggi	SangatTinggi	SangatTinggi	SangatTinggi
		Cakupan kegiatan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kualitas kehidupan umat beragama	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu	%	100	113,49	99,55	100	100	100	100	100

Berdasarkan pada tabel 2.6 diatas Pencapaian Kinerja Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Indikator Cakupan kegiatan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kualitas kehidupan umat beragama, dan Indikator persentase penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu pada tahun 2021,2022 dan 2023 terealisasi 100 % sesuai target.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Unit Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				K	K	K	K	K	K	K	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemkesra
1	Penyediaan Barang dan Jasa Kantor	Tersedianya barang dan jasa	60 Bln	12 Bln	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemkesra
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		76 Dok	19 Dok	19 Dok	19 Dok	19 Dok	19 Dok	19 Dok	Bagian Pemkesra
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Penja PD, RKT,Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD, Perubahan DPAPD	12 Dok	48 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	Bagian Pemkesra
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	20 Kali	80 Dok	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	Bagian Pemkesra

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Unit Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				K	K	K	K	K	K	K	
2 3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan Evaluasi Renja Per Triwulan	7 Dok	28 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	Bagian Pemkesra
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan	-	23 orang	5 Orang	6 Orang	6 Orang	5 Orang	6 Orang	6 Orang	Bagian Pemkesra
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	4 Orang	23 orang	5 Orang	6 Orang	6 Orang	5 Orang	6 Orang	6 Orang	Bagian Pemkesra
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Meningkatnya dukungan sarana prasarana kantor	16 Unit	16 Unit	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemkesra
5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	15 Orang	3 Orang	4 Orang	4 Orang	3 Orang	4 Orang	4 Orang	Bagian Pemkesra
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD SKPD	2 Orang	15 Orang	3 Orang	4 Orang	4 Orang	3 Orang	4 Orang	4 Orang	Bagian Pemkesra
6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	6 Orang	6 Orang							Bagian Pemkesra
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah		19 Orang	4 Orang	5 Orang	5 Orang	4 Orang	5 Orang	5 Orang	Bagian Pemkesra
5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak Daerah (TKD)	4 Orang	19 Orang	4 Orang	5 Orang	5 Orang	4 Orang	5 Orang	5 Orang	Bagian Pemkesra

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Unit Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				K	K	K	K	K	K	K	
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemkesra
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	12 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	Bagian Pemkesra
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	62 Buku	248 Buku	62 Buku	62 Buku	62 Buku	62 Buku	62 Buku	62 Buku	Bagian Pemkesra
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bln	48 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Bagian Pemkesra
		Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bln	48 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Bagian Pemkesra
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Luar Provinsi	30 Kali	120 Kali	30 Kali	30 Kali	30 Kali	30 Kali	30 Kali	30 Kali	Bagian Pemkesra
		Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	20 Kali	80 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	Bagian Pemkesra
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	4 Unit	-	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	Bagian Pemkesra
10	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Kantor Camat Pantai Baru	-	4 Unit	-	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	Bagian Pemkesra
		Pembangunan Kantor Camat Loaholu	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	-	Bagian Pemkesra

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Unit Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				K	K	K	K	K	K	K	
		Pembangunan Mushola Lingkungan Kantor Bupati	-	1 Unit	-	1 Unit	-	-	1 Unit	-	Bagian Pemkesra
10	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	48 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Bagian Pemkesra
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materai Surat Menyurat	12 Bln	48 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Bagian Pemkesra
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telaksananya Pembayaran Rekening telepon/internet, listrik dan air	12 Bln	48 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	Bagian Pemkesra
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemkesra
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Bagian Pemkesra
		Tersediannya Jasa Perijinan Kendaraan Dinas/operasional (1 Mobil, 8 Motor)	10 Unit	40 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	Bagian Pemkesra

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Unit Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				K	K	K	K	K	K	K	
14	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Unit	48 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	Bagian Pemkesra
15	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Kantor Camat Rote Timur, Rote Barat, Ndao Nuse, Kelurahan Metina, Kelurahan Londalusi	-	4 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Bagian Pemkesra
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pelayanan Adm. Pemerintahan dan Kesra	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Pemkesra
12	Administrasi Pemerintahan Tata	Terlaksananya Pengelolaan Adm. Pemerintahan	-	-				0	0	0	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan Bagian Kesejahteraan Rakyat
16	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Rapat Lengkap Pamong Praja	6 Dok	4 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	6 Dok	1 Kali	1 Kali	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Unit Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				K	K	K	K	K	K	K	
		Penyusunan Tanggapan Pemerintah pada Persidangan DPRD	-	24 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	Bagian PemkesrSub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Terlaksanya pembinaan administrasi kecamatan (Paten)	1 Dok	33 dok	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan Bagian Kesejahteraan Rakyat
17	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Penyediaan Data Pembakuan Rupa Bumi Unsur Buatan	2 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bagian Pemkesra
18	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Penyediaan Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) dan Pemuatan RLPPD	1 Dok	8 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	Bagian Pemkesra
		Penyediaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	2 Dok	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bagian Pemkesra

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Unit Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				K	K	K	K	K	K	K	
		Penyusunan Laporan SPM dan Perbub Rencana Aksi Percepatan Penerapan SPM		8 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	Bagian Pemkesra
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terwujudnya Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-			-	0	0	Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bagian Pemkes
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pesprawi, Jamaah Haji, MTQ, Ziarah Rohani, STQ	2 Lem	19 Keg	4 Keg	5 Keg	5 Keg	4 Keg	5 Keg	5 Keg	Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bagian Pemkes
		Terlaksananya Pembinaan Mental Spiritual Kehidupan Beragama	-	12 Lem	3 Lem	3 Lem	3 Lem	3 Lem	3 Lem	3 Lem	Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bagian Pemkes
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Badan/Lembaga/Organisasi MUI)	-	4 Dok NPHD	1 Dok NPHD	1 Dok NPHD	1 Dok NPHD	1 Dok NPHD	1 Dok NPHD	1 Dok NPHD	Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bagian Pemkes
19		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Badan/Lembaga/Organisasi Rumah Ibadah)	-	8 Dok NPHD	2 Dok NPHD	2 Dok NPHD	2 Dok NPHD	2 Dok NPHD	2 Dok NPHD	2 Dok NPHD	Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bagian Pemkes

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Unit Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				K	K	K	K	K	K	K	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Badan/Lembaga/Organisasi GMT KPWK)		16 Dok NPHD	4 Dok NPHD	4 Dok NPHD	4 Dok NPHD	4 Dok NPHD	4 Dok NPHD	4 Dok NPHD	Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bagian Pemkes
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Bersifat Umum : kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan)	1 Dok NPHD	200 Kelompok	50 Kelompok	50 Kelompok	50 Kelompok	50 Kelompok	50 Kelompok	50 Kelompok	Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bagian Pemkes
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Komisi AIDS)	-	4 Dok NPHD	1 Dok NPHD	1 Dok NPHD	1 Dok NPHD	1 Dok NPHD	1 Dok NPHD	1 Dok NPHD	Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bagian Pemkes
20	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kursus Bahasa Inggris bagi Lulusan SMA, Diploma dan Sarjana, Tour Guide (Supir Rental)	345 Orang	300 Org	75 Org	75 Org	75 Org	75 Org	75 Org	75 Org	Bagian Pemkesra
		Pemberian Bantuan Beasiswa dan Pendampingan Mahasiswa Calon Penerima Beasiswa	-	2000 Org	500 Org	500 Org	500 Org	500 Org	500 Org	500 Org	Bagian Pemkesra

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Data Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Unit Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				K	K	K	K	K	K	K	
		Beasiswa Gelar Sarjana S1	-	100 Org	-	25 Org	50 Org	-	25 Org	50 Org	Bagian Pemkesra
		Beasiswa Non Gelar untuk SMA yang lanjut Kuliah	-	35 Org	-	20 Org	25 Org	-	20 Org	25 Org	Bagian Pemkesra
		Beasiswa Riset untuk Mahasiswa Tingkat Akhir	-	40 Org	-	10 Org	25 Org	-	10 Org	25 Org	Bagian Pemkesra
		Sosialisasi Beasiswa pada seluruh SMA- SMA di Kabupaten Rote Ndao dan Universitas- Universitas di Kupang (NTT)		35 Kali	-	20 kali	25 kali	-	20 kali	25 kali	Bagian Pemkesra



Berdasarkan pada tabel 2.7 diatas maka semua program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2021,2022 dan 2023 terealisasi 100 % sesuai target.

A. Faktor Pendukung

1. Dengan adanya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memungkinkan Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mendayagunakan berbagai sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Adanya perkembangan sarana teknologi dan informasi yang memadai yang memungkinkan terbukanya peluang mendapatkan informasi baru dan memudahkan terlaksananya komunikasi yang efektif dengan instansi di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
3. Kondisi sosial, politik dan keamanan serta perekonomian yang cukup stabil dan kondusif;
4. Adanya partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan sehingga dapat berjalan lebih optimal;
5. Kesadaran masyarakat dalam bertoleransi dan menjaga kerukunan beragama cukup baik sehingga memungkinkan kondisi sosial kemasyarakatan yang kondusif;
6. Adanya mitra kerja (lintas program, sektor terkait) yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan dan Kesra.

B. Faktor Penghambat

1. Masih adanya perbedaan pemahaman terhadap makna reformasi birokrasi;
2. Masih sering terjadinya masalah sengketa tanah aset Pemerintah Daerah;
3. Kebutuhan akan adanya peningkatan pelayanan di bidang kesejahteraan rakyat yang cukup tinggi;
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait legalitas sarana dan prasarana rumah ibadah;
5. Masih tingginya ego identitas (suku, agama dan ras) yang ada di masyarakat;
6. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao.

2.3. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao yaitu Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Para Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial. Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao juga menjalin koordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Instansi Vertikal, LSM, BUMN/BUMD, Tokoh Agama, dan lain-lain.

2.5. Mitra Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Rangka Menujang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Sinode GMIT yang dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun sekali.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan tugas pokok dan fungsi Bagian Pemerintahan dan Kesra, maka dilaksanakan pemetaan permasalahan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Belum optimalnya pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan dan pelayanan kesejahteraan rakyat	Koordinasi antar sektor masih lemah
			Implementasi kebijakan ditataran pelaksana belum berjalan optimal
		Masih tingginya angka permasalahan kesejahteraan rakyat di daerah	Kurangnya inovasi dan kreasi serta kegiatan yang belum tepat sasaran dalam pelayanan kesejahteraan rakyat
			Kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan program-program Pemerintah secara optimal masih rendah
		Pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan tidak tepat waktu	Sistem kontrol internal OPD masih rendah
			Tingginya beban kerja aparatur sebagai akibat dari rangkap tugas dan rangkap jabatan tidak sebanding dengan kuantitas SDM

3.2. Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 di atas, maka isu strategis Bagian Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao, dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 3.2
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pemerintahan dan Kesra dan Dinamika Lingkungan Strategis

No	Isu Strategis
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum
2	Belum efektifnya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
3	Belum efektifnya penyelenggaraan kerjasama antar daerah maupun dengan pihak ketiga

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Pemkes Tahun 2025-2026

1. Tujuan

Tujuan jangka menengah Bagian Pemerintahan dan Kesra Setretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao yaitu meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat.

2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

NO	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)		RENSTRA		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN/PENJELASAN	SPM/IKK/LAINNYA	KINERJA AWAL TARGET CAPAIAN		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR RIPD
	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN					REALISASI	TARGET	2025	2026	2026
									2023	2024			
	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Hasil Evaluasi Kemenpan RB	IKU	71,00	71,00	73,00	76,00	76,00
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif didukung oleh Teknologi dan Informasi			Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Rata-Rata Skor Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah	IKK	88,10	89,15	90,00	88,20	88,20
			Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan		Presentase layanan penyelenggaraan pemerintahan dan kesra	%	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesra/ Jumlah rencana Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesra x 100	IKU	100	100	100	100	100

			raan rakyat										
				Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan	Presentase layanan penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan	%	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan / Jumlah rencana pelaksanaan administrasi kegiatan tata pemerintahan x 100	IKU	100	100	100	100	100
				Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	%	Jumlah pelaksanaan kebijakan kesra/Jumlah rencana pelaksanaan kebijakan kesra x 100	IKU	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai Rencana Pembangunan Daerah adalah Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator tujuan indeks reformasi birokrasi serta Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif didukung oleh Teknologi dan Informasi sesuai Rencana Pembangunan Daerah adalah meningkatnya dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

4.2. Cascading Kinerja Bagian Pemkes Tahun 2025-2026

Mengacu dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026, maka gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 sedangkan cascading kinerja Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertikal dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target seperti pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Cascading Kinerja Bagian Pemkes Tahun 2025-2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Awal Tahun	Target Kinerja			Unit Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	Kondisi Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				K	K	K	K	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	Bagian Pemkesra
		Persentase terpenuhinya umum dan kepegawaian	%	100	100	100	100	Bagian Pemkesra
		Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	Bagian Pemkesra
		persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	Bagian Pemkesra
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	-	19	19	38	Bagian Pemkesra
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	-	12	12	24	Bagian Pemkesra
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	-	7	7	14	Bagian Pemkesra
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	5	5	5	10	Bagian Pemkesra
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	5	5	5	10	Bagian Pemkesra
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	12	100	100	100	Bagian Pemkesra

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Awal Tahun	Target Kinerja			Unit Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	Kondisi Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				K	K	K	K	
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	12	12	12	24	Bagian Pemkesra
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	Bagian Pemkesra
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	2	2	4	Bagian Pemkesra
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	4	Bagian Pemkesra
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2	4	Bagian Pemkesra
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	50	57	57	114	Bagian Pemkesra
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-	100	100	100	Bagian Pemkesra
9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	-	2	1	3	Bagian Pemkesra
6	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	24	100	100	100	Bagian Pemkesra
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	12	12	12	24	Bagian Pemkesra
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	12	12	24	Bagian Pemkesra
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	22	100	100	100	Bagian Pemkesra

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Awal Tahun	Target Kinerja			Unit Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	Kondisi Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				K	K	K	K	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	10	10	20	Bagian Pemkesra
13	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	Unit	12	12	12	24	Bagian Pemkesra
14	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	Unit	1	1	1	2	Bagian Pemkesra
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	Bagian Pemkesra
		Cakupan Pelayanan Adm. Pemerintahan dan Kesra	%	100	100	100	100	Bagian Pemkesra
8	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Adm. Pemerintahan	Dok	13	13	13	26	Bagian Pemkesra
15	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dok	7	7	7	14	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan Bagian Kesejahteraan Rakyat
16	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	Dok	1	1	1	2	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan Bagian Kesejahteraan Rakyat
17	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dok	5	5	5	10	Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemkesra
9	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	Dok	14	14	14	28	Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bagian

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Awal Tahun	Target Kinerja			Unit Penanggung Jawab
				2024	2025	2026	Kondisi Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				K	K	K	K	
		Rakyat						Pemkes
18	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dok	14	14	14	28	Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bagian Pemkes
			%	100	100	100	100	Bagian Pemkes

Berdasarkan tabel 4.2 Cascading Kinerja bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024, 2025, dan 2026 dengan target realisasi 100%.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, maka ditetapkan beberapa strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rote Ndao untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Peningkatan kualitas pelaporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dan implementasi kebijakan di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat; dan
5. Infentarisasi, verifikasi, pembakuan serta pembinaan data dan bahan unsur-unsur kewilayahan.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sejalan dengan strategi yang digunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran, maka dirumuskan 6 (enam) kebijakan yang ditempuh Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yaitu:

1. Penguatan koordinasi, komunikasi dan sinergitas antar instansi penyelenggara urusan pemerintahan;
2. Pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
3. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan
5. Fasilitasi dan pembinaan administrasi kewilayahan termasuk pembakuan nama rupa bumi.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat	1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penguatan koordinasi, komunikasi dan sinergitas antar instansi penyelenggara urusan pemerintahan
		2. Peningkatan kualitas pelaporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2. Pembinaan Dan Pendampingan dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
		3. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kecamatan	3. Fasilitasi kegiatan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
		4. Meningkatkan koordinasi dan implementasi kebijakan di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat	4. Peningkatan pemberian bantuan sosial rumah ibadah dan bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu
		5. Infentarisasi, verifikasi, pembakuan serta pembinaan data dan bahan unsur- unsur kewilayahan	5. Fasilitasi dan pembinaan administrasi kewilayahan termasuk pembakuan nama rupa bumi

Berdasarkan tabel 5.1 pada bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat memiliki tujuan yaitu Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat, dengan sasaran yaitu terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat, adapun strategi yaitu Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peningkatan kualitas pelaporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kecamatan, Meningkatkan koordinasi dan implementasi kebijakan di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat, dan arah kebijakan yaitu Penguatan koordinasi, komunikasi dan sinergitas antar instansi penyelenggara urusan pemerintahan, Pembinaan Dan Pendampingan dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Fasilitasi kegiatan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, Peningkatan pemberian bantuan sosial rumah ibadah dan bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu dan Fasilitasi dan pembinaan administrasi kewilayahan termasuk pembakuan nama rupa bumi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bagian Pemerintahan dan Kesra dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bagian Pemerintahan dan Kesra
Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Awal Tahun		Target Kinerja						Unit Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat				Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan kesra	%	100		100		100		100		Bagian Pemkesra
	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat			Persentase Layanan Penyelenggaraan administrasi tata Pemerintahan Kesejahteraan	%	100		100		100		100		Bagian Pemkesra
	Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat			Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	%	100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Awal Tahun		Target Kinerja						Unit Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	n rakyat					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100	758,664,000	100	6,395,000,000	100	1.260.000.000	100	7.655.000.000	Bagian Pemkesra
		Persentase terpenuhinya umum dan kepegawaian		%	100	100		100		100		Bagian Pemkesra		
		persentase penyedia administrasi keuangan perangkat daerah		%	100	100		100		100		Bagian Pemkesra		
		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik												
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	-	-	19	30,000,000	19	30,000,000	38	60,000,000	Bagian Pemkesra
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	-	-	12	20,000,000	12	20,000,000	24	40,000,000	Bagian Pemkesra
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	-	-	7	10,000,000	7	10,000,000	14	20,000,000	Bagian Pemkesra
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dok	5	61,620,000	5	90,000,000	5	90,000,000	10	180,000,000	Bagian Pemkesra
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	5	61,620,000	5	90,000,000	5	90,000,000	10	180,000,000	Bagian Pemkesra		

Tujuan	Sasaran	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Awal Tahun		Target Kinerja						Unit Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	12	13,800,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	60,000,000	Bagian Pemkesra
		4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	12	13,800,000	12	30,000,000	12	30,000,000	24	60,000,000	Bagian Pemkesra
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	211,348,000	100	296,000,000	100	296,000,000	100	592,000,000	Bagian Pemkesra
		5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	15,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	4	60,000,000	Bagian Pemkesra
		6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15,000,000	2	21,000,000	2	21,000,000	4	42,000,000	Bagian Pemkesra
		7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	38,912,000	2	40,000,000	2	40,000,000	4	80,000,000	Bagian Pemkesra
		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	50	142,436,000	57	205,000,000	57	205,000,000	114	410,000,000	Bagian Pemkesra
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-	-	100	5,635,000,000	100	500.000.000	100	6.135.000.000	Bagian Pemkesra
		9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	-	-	2	5,635,000,000	1	500.000.000	3	6,135,000,000	Bagian Pemkesra
		6	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	24	13,846,000	100	14,000,000	100	14,000,000	100	28,000,000	Bagian Pemkesra
		10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Lap	12	1,846,000	12	2,000,000	12	2,000,000	24	4,000,000	Bagian Pemkesra

Tujuan	Sasaran	No	Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Awal Tahun		Target Kinerja						Unit Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Surat Menyurat										
		11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	12,000,000	12	12,000,000	12	12,000,000	24	24,000,000	Bagian Pemkesra
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	22	458,050,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	600,000,000	Bagian Pemkesra
		12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	39,600,000	10	46,000,000	10	46,000,000	20	92,000,000	Bagian Pemkesra
		13	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	Unit	12	3,450,000	12	4,000,000	12	4,000,000	24	8,000,000	Bagian Pemkesra
		14	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	Unit	1	415,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	2	500,000,000	Bagian Pemkesra
		2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100	1,575,748,500	100	2,791,505,000	100	2,791,505,000	100	5,583,010,000	Bagian Pemkesra
				Cakupan Pelayanan Adm. Pemerintahan dan Kesra	%	100		100		100		100		Bagian Pemkesra
		8	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Adm.	Dok	13	750,748,500	13	1,100,000,000	13	1,100,000,000	26	2,200,000,000	Bagian Pemkesra

Tujuan	Sasaran	No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Awal Tahun		Target Kinerja						Unit Penanggung Jawab			
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Pemerintahan													
		15	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dok	7	309,783,000	7	400,000,000	7	400,000,000	14	800,000,000	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan Bagian Kesejahteraan Rakyat			
		16	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	Dok	1	50,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	2	200,000,000	Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan Bagian Kesejahteraan Rakyat			
		17	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dok	5	390,965,500	5	600,000,000	5	600,000,000	10	1,200,000,000	Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemkesra			
		9	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dok	14	825,000,000	14	1,691,505,000	14	1,691,505,000	28	3,383,010,000	Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bagian Pemkes			
		18	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dok	14	825,000,000	14	1,691,505,000	14	1,691,505,000	28	3,383,010,000	Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bagian Pemkes			
TOTAL						2.334.412.500			9.186.505.000			4.051.505.000			13.238.010.000		Bagian Pemkes

Berdasarkan Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Bagian Pemerintahan Dan Kesra Setda Kabupaten Rote Tahun Anggaran 2024 Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar 758,664,000 Dan Pada Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sebesar 1,575,748,500, Pada Tahun Anggaran 2025 Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar 6,395,000,00 Dan Pada Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sebesar 1.260.000.000, Pada Tahun Anggaran 2026 Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar 2,791,505,000 dan Pada Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sebesar 2,791,505,000.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja merupakan sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra Pemkes Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bagian Pemkes, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2026

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Formula Pengukuran/Penjelasan	Kinerja Awal		Target Capaian		Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra 2026
				Realisasi	Target			
				2023	2024	2025	2026	
1.	Presentase layanan penyelenggaraan pemerintahan dan kesra	%	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesra/ Jumlah rencana Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesra x 100	100	100	100	100	100
2.	Presentase Layanan Penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan	%	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan / Jumlah rencana pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan x 100	100	100	100	100	100
3.	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	%	Jumlah pelaksanaan kebijakan kesra/Jumlah rencana pelaksanaan kebijakan kesra x 100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Rote Ndao periode tahun 2025-2026. Rencana strategis ini disampaikan sebagai acuan bagi Bagian Pemerintahan dan Kesra dalam melaksanakan program – program dan kegiatan pembangunan khususnya di bidang peningkatan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Rencana strategis ini akan dilaksanakan untuk mengantisipasi berbagai aspek yang diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat maupun berbagai isu strategis yang berkembang baik di tingkat Nasional maupun pada tingkat Provinsi serta di tingkat Kabupaten. Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis ini akan diuraikan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat anggaran pendapatan dan belanja dan disusun berdasarkan pendapatan kinerja yang akan ditetapkan setiap tahunnya.

Demikian rencana strategis ini disusun sebagai alat manajemen strategis Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, namun dilain pihak keberhasilan implementasi rencana strategis ini sangat ditentukan oleh pemahaman dan kreatifitas pihak-pihak yang menggunakannya sebagai acuan untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Rote Ndao.

Baa, Januari 2024
Kepala Bagian Pemerintahan
dan Kesra
Setda. Kabupaten Rote Ndao,

Ronald H. Taulo, S.STP
Pembina
NIP. 19851023 200312 1 002